

TRANSFORMASI BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE: KUNCI INDONESIA KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP

Rabu, 12 Februari 2025 - Nurul Istiamuji

Jakarta - Seminar Nasional yang diselenggarakan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di Manhattan Hotel, Jakarta, pada Rabu (12/2), menghadirkan berbagai pemangku kepentingan guna membahas strategi Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Acara ini dihadiri oleh narasumber dari Kementerian PANRB, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ESDM, dan pelaku usaha. Dalam diskusi ini, terungkap bahwa stagnasi ekonomi akibat MIT dapat diatasi melalui reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam sambutannya Anggota Ombudsman RI Dr. Hery Susanto, M.Si menegaskan bahwa transformasi birokrasi merupakan langkah mendasar dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. "Birokrasi yang transparan dan efisien adalah fondasi utama dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi," ujarnya. Hal ini sejalan dengan tantangan utama yang dihadapi Indonesia, yakni produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, biaya produksi tinggi, serta kurangnya nilai tambah pada produk industri nasional.

Middle Income Trap adalah kondisi ketika negara berpendapatan menengah tidak bisa bertransisi menjadi negara berpendapatan tinggi. Karena negara tidak mampu bersaing dengan negara lain, kurangnya investasi pada pendidikan dan pelatihan keterampilan, peningkatan biaya produksi dan upah pekerja, kurangnya keterlibatan swasta, keterbatasan tenaga kerja, migrasi pekerja dari desa ke kota besar.

Untuk mengatasi MIT, negara perlu melakukan inovasi dan efisiensi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah: hilirisasi sumber daya alam, transformasi sektor industri, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, peningkatan akselerasi pembangunan infrastruktur.

Sekretaris Jenderal KAHMI, Syamsul Qomar, menambahkan bahwa reformasi birokrasi juga harus mencakup penyederhanaan regulasi untuk mempercepat proses perizinan investasi. "Kita harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak menjadi hambatan, melainkan fasilitator bagi pertumbuhan ekonomi," kata Syamsul. Ia menyoroti perlunya keterlibatan lebih besar dari sektor swasta dalam pembangunan, dengan dukungan pemerintah yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan industri.

Staf Ahli Menteri PANRB, Abdul Hakim, menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret dalam memperbaiki sistem birokrasi, termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). "Digitalisasi adalah kunci untuk memangkas birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik," jelasnya. Ia menegaskan bahwa dengan sistem yang lebih efisien, investasi dapat masuk lebih cepat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu, Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi, Riyatno, mengungkapkan bahwa meskipun realisasi investasi 2024 mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, masih terdapat tantangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor. "Keamanan investasi sangat penting. Kasus premanisme di kawasan industri harus segera ditangani agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif," katanya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menekankan bahwa transformasi industri berbasis energi hijau juga merupakan strategi utama dalam keluar dari MIT. "Hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan energi baru terbarukan akan memberikan nilai tambah pada produk ekspor kita, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil," ujar Eniya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan

target pemerintah dalam mencapai net-zero emissions pada 2060.

Di sisi lain, persoalan maladministrasi dalam pelayanan publik perijinan usaha juga menjadi perhatian dalam seminar ini. Ketua Relawan Setia Prabowo, Sutomo mengungkapkan bahwa bentuk maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, dan permintaan imbalan masih sering terjadi. "Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak oknum-oknum yang melakukan praktik maladministrasi agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tetap terjaga," tegasnya.

Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan menambahkan bahwa sektor industri juga harus berperan aktif dalam mendukung efisiensi birokrasi. "Kami berharap adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan kebijakan yang ramah investasi, termasuk dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam," ujarnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah dan sektor swasta sepakat untuk mempercepat transformasi birokrasi melalui digitalisasi, peningkatan investasi di sektor strategis, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik maladministrasi. Seminar ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan guna mengatasi Middle Income Trap dan membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi dalam dekade mendatang.